



PENETAPAN
Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Jasruddin Bin Baco, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 09 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Asoka, Rt. 09, Desa Harapan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan sebagai Pemohon I

Suharni Binti Rudding, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 10 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Asoka, Rt. 09, Desa Harapan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Nnk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **30 Mei 1999** di **Lahat Datu, Sabah, Malaysia**;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama **Rudding bin Daeng Manlureng** kemudian mewakili kepada Imam kampung yang bernama **H. Imam Hasan**, sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Abdul Jalil bin Bacodan Rahim**;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM.500 (Lima Ratus Ringgit Malaysia) dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. **Muhammad Andie bin Jasruddin**;
 - b. **Irdawati binti Jasruddin**;
 - c. **Hasmawati binti Jasruddin**;
 - d. **Nafita Aliya binti Jasruddin**;
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Para Pemohon berada di Malaysia para Pemohon tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke konjen R.I.;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor **178/Pdt.P/2020/PA.Nnk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Jasruddin bin Baco**) dengan Pemohon II (**Suharni binti Rudding**) yang dilaksanakan pada tanggal **30 Mei 1999** di, **Malaysia**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Agustus 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nunukan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405060905760001, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 23 April 2018, bukti surat

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor **178/Pdt.P/2020/PA.Nnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405065910810003, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 23 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga, Nomor 6405062506120004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 16 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saharuddin bin Rajulla, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.003 Desa Semunap Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon I dengan mereka;
 - Bahwa saksi hadir pada saat menikahnya para Pemohon sekitar tahun 1999 di Lahat Datu, Sabah, Malaysia;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan ;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Agama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah **Rudding bin Manlureng**, orang tua dari Pemohon II, dan yang mengadakan penghulu kampung bernama **H. Imam Hasan**, serta yang menjadi saksi ada dari kedua keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta saksi sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I berupa RM.500 (Lima Ratus Ringgit Malaysia) dan dibayar tunai;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 4 orang anak bernama,
 - a. **Muhammad Andie bin Jasruddin;**
 - b. **Irdawati binti Jasruddin;**
 - c. **Hasmawati binti Jasruddin;**
 - d. **Nafita Aliya binti Jasruddin;**
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga maupun masyarakat serta aparat pemerintah ditempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan sebagai syarat administrasi untuk syarat administrasi membuat akta kelahiran anak, dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;
2. Wati binti Makka Talli, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.003 Desa Semunap Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tante Pemohon II dengan mereka;
 - Bahwa saksi hadir pada saat menikahnya para Pemohon sekitar tahun 1999 di Lahat Datu, Sabah, Malaysia;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan ;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Agama Islam;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah **Rudding bin Manlureng**, orang tua dari Pemohon II, dan yang mengadakan penghulu kampung bernama **H. Imam Hasan**, serta yang menjadi saksi ada dari kedua keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I berupa RM.500 (Lima Ratus Ringgit Malaysia) dan dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 4 orang anak bernama,
 - a. **Muhammad Andie bin Jasruddin**;
 - b. **Irdawati binti Jasruddin**;
 - c. **Hasmawati binti Jasruddin**;
 - d. **Nafita Aliya binti Jasruddin**;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga maupun masyarakat serta aparat pemerintah ditempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan sebagai syarat administrasi untuk syarat administrasi membuat akta kelahiran anak, dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor **178/Pdt.P/2020/PA.Nnk**



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nunukan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Lahat Datu, Sabah, Malaysia, pada tanggal 30 Mei 1999, dengan wali nikah orang tua Pemohon II bernama Rudding bin Daeng Manlurreng, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu kampung bernama H. Imam Hasan, dengan maskawin berupa RM.500 (Lima Ratus Ringgit Malaysia), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdul Jalil bin Baco dan Rahim, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk syarat menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d. P. ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan materinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, sehingga tepat jika para Pemohon mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 30 Mei 1999 di Lahat Dato, Sabah, Malaysia, dengan wali nikah orang tua Pemohon II bernama Rudding bin Daeng Malunreng yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu kampung, bernama h. Imam Hasan, dengan maskawin berupa RM.500 (Lima Ratus Ringgit Malaysia), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abdul Jalil bin Baco dan Rahim;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Muhammad Andie bin Jasruddin;**

b. **Irdawati binti Jasruddin;**

c. **Hasmawati binti Jasruddin;**

d. **Nafita Aliya binti Jasruddin;**

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk syarat administrasi pembuatan sebagai syarat administrasi membuat akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas Hakim Pengadilan Agama Nunukan menilai bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1999, di Lahat Dato, Sabah, Malaysia, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut ketentuan hukum/syari'at Islam, yang terdiri dari unsur-unsur, ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah, ijab dan kabul, ada 2 (dua) orang saksi nikah, dan ada mahar (maskawin);

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sebagai tersebut di atas, pernikahan para Pemohon tidak terdapat adanya larangan dan/atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah SWT. dalam Surat An-Nisa ayat 22, dan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 29, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 42, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Agama Nunukan berpendapat pula, bahwa pernikahan para Pemohon telah sejalan dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat, meskipun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi tidak ada maksud untuk menghindar dari undang-undang, dan pula masih ada keyakinan di masyarakat, bahwa suatu akad pernikahan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya menurut hukum syara' serta dilaksanakan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan kiayi atau ustadz, maka pernikahan tersebut telah sah, meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :

وفي الدّعى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولي وشاهدين عدل

Artinya : *"Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";*

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *"Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan para Pemohon petitum angka 2, maka telah sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (e), Pasal 4, dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Jasruddin bin Baco**) dengan Pemohon II (**Suharni binti Rudding**) yang dilaksanakan pada tanggal **30 Mei 1999** di Lahat Dato, Sabah, Malaysia;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Zuhriah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Ridho, S.Ag

Hakim Anggota I,

ttd

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Zuhriah, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor **178/Pdt.P/2020/PA.Nnk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Pengumuman : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp700.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya dan
*telah/belum bekuatan hukum tetap *sejak tanggal 17
September 2020;

Diberikan kepada : para Pemohon;

Atas permintaan : para Pemohon;

Untuk Kepentingan : Pencatatan Pernikahan di KUA;

Nunukan, 17 September 2020

Panitera,

ttd

Muhammad Yusuf, S.H.

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor **178/Pdt.P/2020/PA.Nnk**